



SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HARI OEANG KE-71 TAHUN 2017

“Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dan Menurunkan Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial”

Jakarta, 19 Oktober 2017 – Sebagai rangkaian dari kegiatan untuk memperingati Hari Oeang ke-71 tahun 2017, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dengan tema “Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Menurunkan Kesenjangan melalui Peningkatan Efektivitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial” pada tanggal 19 Oktober 2017. Hal ini sejalan dengan fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menempatkan program-program perlindungan sosial sebagai prioritas selain pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Penyempurnaan terhadap pelaksanaan program-program perlindungan sosial terus diupayakan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran, perbaikan mekanisme serta perluasan sasaran dengan tujuan utama untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Melalui seminar ini diharapkan akan muncul ide-ide segar dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat, serta lebih efektif dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Seminar yang dibuka oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan ini menghadirkan lima pembicara yang berasal dari Kementerian Sosial, Bappenas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), SMERU Research Institute dan Bank Dunia.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial mengalami beberapa tantangan, antara lain ketepatan sasaran yang perlu ditingkatkan, sinergi antarprogram, serta sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tantangan tersebut perlu direspon secara cepat dan tepat agar program perlindungan sosial tersebut dapat berjalan efektif untuk mengakselerasi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Pembicara pertama dari Kementerian Sosial (Dr. Harry Z. Soeratin, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial) menyatakan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengatasi perbedaan pendapatan dan kekayaan yang menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas program perlindungan sosial yang dilaksanakan Pemerintah, Dr. Asep Suryahadi, Direktur SMERU Research Institute menyebutkan, program dimaksud cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan, tetapi perlu dilakukan upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan cara meningkatkan keakuratan penargetan, memperluas cakupan, memperbesar manfaat dan memperbaiki integritas sasaran program. Pembicara ketiga yaitu Dr. Elan Satriawan (Ketua Pokja Kebijakan, TNP2K) menyampaikan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal merupakan kerangka kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Menurut Dr. Pungky Sumadi (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas), koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penguatan perencanaan program perlindungan sosial secara komprehensif melalui pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan terpadu (SLRT), pembangunan database program perlindungan sosial terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta percepatan perolehan dokumen kependudukan khusus kepemilikan akta kelahiran dan pemanfaatan NIK merupakan langkah pemerintah untuk mendorong efektivitas program dimaksud. Pembicara terakhir, Dr. Vivi Alatas (Kantor Bank Dunia di Jakarta) menyampaikan tentang pentingnya inovasi di bidang *behavioural science* dan teknologi informasi untuk membantu Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, Dr. Hidayat Amir (Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) yang bertindak selaku moderator dalam seminar ini menyampaikan bahwa berbagai pemikiran yang berkembang, masukan yang disampaikan oleh para pembicara maupun ide yang muncul dari diskusi akan menjadi sumbangsih pemikiran yang sangat berharga bagi Pemerintah dalam merumuskan strategi untuk menyempurnakan berbagai program perlindungan dan jaminan sosial sehingga tujuan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan di masyarakat dapat semakin efektif guna menghantarkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Info lebih lanjut hubungi

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin No.1
Gedung R.M. Notohamiprodjo
e-mail : ikp@fiskal.kemenkeu.go.id